

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Bayumedia Publising. Malang.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ahmadi, R. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Ar-ruzz Media. Yogyakarta.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Arifiyanto, D.F. dan T. Kurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*. Universitas Pendidikan Indonesia. Jember 2 (3):473-485.
- Atmadja, A, T. 2013. Dekonstruksi Terhadap Ideologi Dibalik Pemilihan Jurusan Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Ikip Negeri Singaraja). *Desertasi*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Bali.
- Auditya, L, H dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairnes* 3 No 1.
- Bintarto,R. 1997 Suatu Pengantar Geografi Desa. U.p Spring. Yogyakarta.
- Bpk, 2012. Perwakilan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-gresik>. Diakses tanggal 21 Januari 2021 (14.35).
- Bungin, B. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Candraditya, V, J. 2017. ICW Temukan 110 Kasus Korupsi Anggaran Desa Periode 2016-2017. *Tribunnews.com*. Diakses tanggal 11 Agustus 2021 (16:04).
- Damayanti, W.2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

- Eva, J dan S. Abdullah. 2020. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (IMKA)* 5(2): 213-221.
- Faridah dan B. Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 4 (1): 1-120.
- Hasibuan, S.P. 2004. Organisasi dan Motivasi. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. 2005. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29.
- Guritno, T. 2021. ICW Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi Desa Perlu Diawasi Ketat. *Kompas.com*. Diakses tanggal 22 Maret 2021 (18:09).
- Kristiaten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN. Jakarta.
- Leedy. 1997. *Practical Research Planning and Design*. New Jersey .Merrill Prentice Hall.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Pres. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. UI Press. Jakarta.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Kencana. . Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 17 Juni 2016. Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 333. Gresik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 8 Mei 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 3 Juni 2014. Lembaga Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 30 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Gresik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Desa*. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 *tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 24 Juli 2007. Nomor 374. Jakarta.
- Prasetyo, Y. 2021. Website Resmi Desa Wahas.<http://desawahas.gresikkab.go.id>. Diakses tanggal 21 November 2021. (15:20).
- Purhantara, W. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ramadanis dan M. Ahyaruddin. 2019. Akuntailitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi & Ekonomika (JAE)* 9(1): 112-118.
- Sabeni, A dan Ghozali. 2001. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Empat. BFE. Yogyakarta.
- Sangadji, E. M. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Sari, N. R. 2015. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. *Skripsi*. University of Muhammadiyah. Malang.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV. Bandung.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV. Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sukmadinata, N. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Penerbit Read. Banda Aceh.
- Tersiana, A. 2018. *Metode Penelitian*. Penerbit Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tiwinariti. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Se-Kecamatan Musuk

Kabupaten Boyolali. *Skripsi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Ulum, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Graha Hyun. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

Winardi. 1998. *Ilmu Ekonomi dan Aspek-Aspek Metodologis*. Rineka Cipta. Jakarta.

Yeni, F.S. dan U. L. Nanda. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *Skripsi*. Universitas Pamulang. Tangerang Selatan.

